

**ANALISIS PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH,
KUALITAS LKPD, TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN
DAERAH, DAN TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
TERHADAP TRANSPARANSI INFORMASI KEUANGAN DAERAH
PADA SITUS RESMI PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa
Tengah)**

**Samsi Atiin Nur Khasanah Dewi
Agus Purwanto¹**

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +6285848193101

ABSTRACT

The purpose of this research is to gather empirical evidence about the size of local governments, the quality of Regional Government Financial Reports (LKPD), the level of regional financial independence, and public welfare on local government transparency, as measured by the availability and accessibility of Regional Financial Information (IKD) on the official website of the local government. The population of this study is the Central Java district/municipality administration. In this study, 29 district administrations and 6 municipality governments in Central Java were used as the sample, with a 5-year observation period (2015-2019). The census approach was employed as a sample method. A total of 162 observations were collected for this study. Using the IBM Statistical Program Social Science (SPSS) 25, the analytical method in this study uses two methods: multiple linear regression to examine the accessibility of Regional Financial Information (IKD) and logistic regression to examine the availability of Regional Financial Information (IKD) on the official local government website. According to the findings, only the quality of local government financial reports had an empirically significant impact on the accessibility and availability of local financial information on the official websites of district/city local governments in Central Java.

Keywords: Transparency, Regional Financial Information, Local Government Official Website, Internet Financial Reporting.

PENDAHULUAN

Indonesia telah memberlakukan suatu regulasi yang menjelaskan bahwa kekuasaan pemerintahan pusat diserahkan pada daerah otonomi berdasarkan kaidah yang berlaku. Regulasi tersebut termaktub dalam UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dengan diberlakukannya aturan tersebut, maka timbul suatu otonomi bagi pemerintah daerah. Privilese dalam mengatur dan mengelola secara mandiri urusan pemerintahannya diberikan kepada pemerintah daerah provinsi, kotamadya, serta kabupaten. Dalam konteks keagenan, pemerintah daerah sebagai agen adalah pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat yang berperan sebagai prinsipal untuk menggerakkan roda pemerintahan yakni dengan memberikan pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan hal tersebut, pemerintah mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk mengelola dana dari masyarakat dan sumber daya yang lain. Konsekuensi atas mandat masyarakat kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber

¹ Corresponding author

daya yang dimiliki ialah dengan mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan sumber daya tersebut pada masyarakat. Salah satu wujud pertanggungjawaban adalah melalui transparansi pemerintah daerah kepada masyarakat dengan memberikan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah secara terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan keataan pemerintah daerah pada peraturan perundang-undangan. Selain itu, akuntabilitas dan transparansi merupakan salah satu elemen untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pernyataan nomor 01 paragraf Sembilan menjelaskan bahwa disajikannya laporan keuangan oleh pemerintah secara spesifik bertujuan menyediakan informasi yang dapat bermanfaat guna pengambilan keputusan serta merefleksikan akuntabilitas. Kerangka konseptual SAP memberikan pernyataan bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah daerah diperuntukan sebagai kepentingan akuntabilitas serta transparansi pada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, peningkatan transparansi telah menjadi perhatian bagi pemerintah. Perhatian atas transparansi di Indonesia ditandai dengan dilahirkannya UU No. 14 tahun 2008 oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Pasal 9 Ayat (4) UU KIP menyatakan informasi publik seperti informasi keuangan harus disampaikan melalui media yang mudah dijangkau oleh publik dan bahasa yang tidak sulit dipahami. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memfungsikan media internet sebagai media penyebarluasan informasi yang dianggap cepat dan *real time*.

Penyampaian informasi keuangan melalui internet menjadi perantara yang saat ini paling mudah dijangkau oleh khalayak luas serta efektif bagi pemerintah daerah untuk menyajikan informasi tentang pengelolaan keuangan (K, Styles, 2007). Era teknologi informasi dan komunikasi seperti saat ini menjadikan internet memiliki peranan penting yakni memiliki kemaslahatan bagi entitas sektor publik untuk menyebarluaskan informasinya sehingga mampu meningkatkan transparansi yang menjadi segmen tak terpisahkan dari tata kelola pemerintah yang baik dan demokratis (Aronmwan & Asiriwuwa, 2018). Dengan terjangkaunya akses terhadap informasi keuangan pemerintah, masyarakat dapat mengetahui serta mengawasi program-program pemerintah serta menilai kinerja pemerintah dalam mengelola keuangannya. Tengara praktik pelaporan *online* semakin berkembang, hal tersebut juga dilatarbelakangi dengan berkembangnya *website* atau situs resmi. Oleh sebab itu, Pasal 13 (b) PP RI No. 56 Tahun 2005 menyebutkan bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) diselenggarakan oleh pemerintah daerah di daerah masing-masing dengan menyajikan informasi keuangan daerah melalui situs resmi pemerintah daerah (Republik Indonesia, 2005). Transparansi informasi keuangan daerah pada situs resmi dengan mendayagunakan internet merupakan bagian penting dari *e-government* (Ningsih, 2018). Wanda dan Martani (2015) menyatakan bahwa pengembangan *e-government* melalui situs resmi pemerintah daerah bertujuan agar pelayanan publik tidak menyulitkan dan berbiaya rendah.

Meskipun terdapat regulasi yang mengikat badan publik seperti pemerintah daerah untuk menyelenggarakan transparansi informasi keuangan daerah melalui situs resmi, fakta yang ada menyebutkan bahwa publikasi informasi keuangan melalui media seperti internet merupakan pengungkapan yang tidak diwajibkan dan bersifat sukarela (*voluntary*). Sebagai imbas dari kesukarelaan tersebut data keuangan yang dipublikasikan dalam situs resmi setiap pemda menjadi sangat heterogen (García & García-García, 2010). Berdasarkan hasil penelitian Utomo dan Aryani (2017), tingkat ketersediaan informasi keuangan daerah pada situs resmi tergolong rendah dengan persentase sebesar 42,07% bahkan Pusat Telaah dan

Informasi Regional (Pattiro) menyatakan hanya 28% pemerintah daerah yang mengungkapkan laporan keuangannya pada *website* pemda masing-masing (Utomo & Aryani, 2017). Alwahidi dan Darwanis (2019) juga menyebutkan hanya 6 kabupaten/kota di Indonesia yang mendapat predikat substansial atas transparansi informasi keuangan. Hal ini menarik untuk diteliti, namun sejauh ini masih sedikit penelitian yang meneliti faktor-faktor internal, sosioekonomi, dan faktor penentu lainnya yang mempengaruhi dorongan pemerintah daerah khususnya pada suatu kabupaten/kota dalam transparansi informasi pengelolaan keuangannya. Oleh sebab itu, berbeda dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini peneliti menggunakan ruang lingkup pemerintah daerah tingkat II yaitu pemerintah kabupaten/kota yang berada di provinsi Jawa Tengah.

Pemerintah daerah di provinsi Jawa Tengah memperoleh peringkat tertinggi pada indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah dengan indeks sebesar 50% berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tahun 2016 (Ritonga & Syahrir, 2016). Selain itu, Pemerintah provinsi Jawa Tengah dinobatkan sebagai provinsi paling informatif tingkat nasional. Nilai unggul 99,15 diperoleh oleh pemprov Jawa Tengah, disusul oleh pemprov DKI Jakarta 99,07, serta Jawa Barat 98,15 pada tahun 2018. Prestasi terkait Keterbukaan Informasi Publik diraih oleh Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 dan 2020. Pencapaian yang didapat oleh pemprov Jawa Tengah tidak terlepas dari peran serta yang baik antar badan publik, salah satunya adalah sinergi dari seluruh pemerintah kabupaten/kota. Pada tahun 2018, sebanyak 17 pemerintah kabupaten/kota dikategorikan sebagai informatif utama, informatif, menuju informatif, dan cukup informatif (Informasi, 2018). Sedangkan pada tahun 2020, mengalami peningkatan menjadi 19 pemerintah kabupaten/kota dikategorikan sebagai informatif dan menuju informatif (Informasi, 2020).

Penelitian dari perspektif sektor publik yang dilakukan oleh Style dan Tennyson (2007) menganalisis faktor-faktor seperti ukuran daerah, struktur pemerintahan, kualitas pengungkapan akuntansi, pendapatan per kapita, tingkat hutang, dan kondisi keuangan terhadap tingkat ketersediaan dan keteraksesan laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran daerah, kualitas pengungkapan akuntansi, pendapatan perkapita, tingkat utang berpengaruh terhadap ketersediaan laporan keuangan di internet sedangkan keteraksesan laporan keuangan secara positif dipengaruhi oleh ukuran pemerintah daerah, pendapatan per kapita, tingkat utang. Penelitian Medina (2012) menyebutkan ketersediaan informasi keuangan daerah pada situs resmi pemda di Indonesia dipengaruhi oleh ukuran pemerintah daerah, rasio kemandirian dan kompleksitas pemerintah. Sedangkan ukuran pemerintah daerah dan kompleksitas pemerintah mempengaruhi tingkat keteraksesan informasi keuangan pada *website* pemda di Indonesia. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Makmum dan Rahayu (2018) menunjukkan bahwa opini audit secara parsial berpengaruh negatif signifikan, sedangkan ukuran pemerintah dan kemampuan keuangan daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada situs resmi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian Dewi dan Adi (2019) menunjukkan variabel jumlah penduduk memiliki pengaruh negatif tidak signifikan, sedangkan variabel tingkat pendidikan dan opini audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi informasi keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat perbedaan hasil pada penelitian terdahulu yang sejenis sehingga perlu dilakukan penelitian kembali dengan menganalisis pengaruh faktor-faktor yang berkaitan dengan karakteristik pemerintah daerah seperti ukuran pemerintah daerah dan tingkat kemandirian keuangan daerah, faktor sosioekonomi yaitu tingkat kesejahteraan masyarakat, dan faktor penentu lainnya seperti kualitas LKPD yang diprosikan melalui opini audit BPK terhadap transparansi informasi keuangan daerah pada situs resmi pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah selama tahun anggaran 2015 sampai dengan 2019.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Institusional

Menurut Meyer dan Rowan (1977) serta DiMaggio dan Powell (1983) teori institusional merupakan teori yang menjelaskan bahwa organisasi menanggapi tekanan dari konteks kelembagaan mereka. Oleh sebab itu, teori institusional menyarankan bahwa organisasi memberikan respon terhadap bentuk tekanan yang ada dalam konteks kelembagaan (Carpenter & Feroz, 2001). Bentuk respon yang diberikan ialah dengan diadopsinya struktur dan praktik-praktik manajemen sebagai pilihan organisasi yang dianggap sesuai dan diterima secara sosial untuk mendapatkan legitimasi dari konteks kelembagaan suatu organisasi. Praktik-praktik serta struktur yang telah diadaptasi dalam rangka mendapatkan legitimasi dapat terjadi melalui 3 proses yang disebut sebagai *isomorphism* yaitu *coercive isomorphism*, *mimetic isomorphism*, dan *normative isomorphism*. Falkman dan Tagesson (2008) mengatakan bahwa teori institusional merupakan suatu teori yang dapat menjelaskan praktik-praktik dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah (Falkman & Tagesson, 2008). Menurut Ratmono (2013) praktik pelaporan keuangan melalui situs remisi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat dianggap sebagai bentuk adopsi praktik-praktik sah dan mendapat penerimaan sosial dengan maksud untuk memperoleh legitimasi atau pengakuan dari konteks institusional pemerintah daerah yakni masyarakat, pemerintah pusat, dan organisasi lainnya (Ratmono, 2013).

Teori Agensi

Teori agensi menjelaskan mengenai hubungan antara *principal* dan *agent*. Hubungan antara *principal* dan *agent* muncul ketika satu pihak yaitu prinsipal mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawabnya kepada pihak lain yaitu agen. Dalam konteks pemerintahan di Indonesia, pemerintah daerah berperan sebagai pihak *agent*, sedangkan masyarakat dan *stakeholder* lainnya merupakan *principal*. Masyarakat selaku *principal* memberikan amanat kepada pemerintah daerah untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemerintah daerah selaku *agent* memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil pelaksanaan pemerintahan kepada masyarakat. Hasil dari pelaksanaan pemerintahan terkait dengan penggunaan sumber daya yang telah dipercayakan masyarakat sebagai *principal* yaitu dalam bentuk laporan keuangan. Keterbukaan informasi keuangan daerah oleh pemerintah daerah menjadi hal yang perlu diperhitungkan sebagai upaya meminimalisir perselisihan kepentingan dalam hubungan keagenan. Kemudahan menjangkau informasi keuangan daerah di internet memberikan peluang besar untuk masyarakat dalam hal pengawasan terhadap kinerja pemda tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu (Wau, 2015).

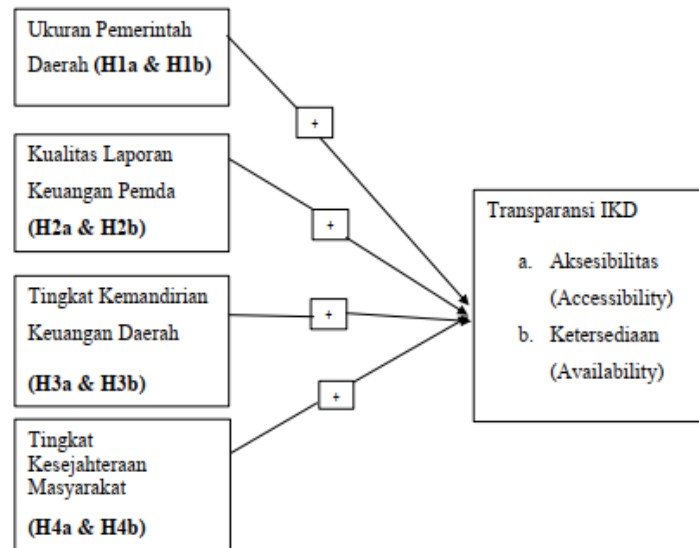
Teori Pensinyalan

Dalam perspektif publik khususnya konteks pemerintahan, teori pensinyalan memberikan penjelasan bahwa pemerintah sebagai pemegang amanat rakyat untuk menggerakkan roda pemerintahan akan berupaya untuk menunjukkan sinyal positif kepada masyarakatnya (Martani *et al.*, 2013). Tanggung jawab pemerintah untuk memberikan sinyal berupa informasi positif merefleksikan langkah untuk memberikan keyakinan yang memadai pada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah pun ditekan oleh masyarakat agar konsisten menyajikan pencapaian pemerintah serta kinerjanya. Dorongan untuk memberikan informasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah muncul dikarenakan adanya kesenjangan informasi pemerintah daerah dengan masyarakat. Kesenjangan informasi muncul disebabkan oleh tidak diketahuinya info internal pemerintah oleh masyarakat luas (Sutaryo & Tri Amanu, 2020). Oleh sebab itu, teori *signalling* mendukung dalam mengurangi kesenjangan informasi (Ningsih, 2018). Menurut Martani dan Puspita (2012)

dalam Wau (2015) cara menyampaikan sinyal atau informasi positif pada masyarakat dapat dilakukan dengan pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas serta melakukan pengungkapan lebih lengkap disertai penjelasan detail dalam situs resmi.

Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dirumuskan seperti Gambar 1.

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Peneliti, 2021

Pengaruh Ukuran Pemda Terhadap Aksesibilitas dan Ketersediaan IKD Pada Situs Resmi Pemda

Ukuran pemda merupakan besar kecilnya ukuran suatu pemda, tercermin dari jumlah aset yang dimiliki. Secara umum, besarnya ukuran suatu pemda berbanding lurus atas tuntutan yang diberikan kepada pemda untuk lebih terbuka atas keuangan yang telah dikelola sebagai wujud pertanggungjawaban publik dengan kapasitas pengungkapan optimal terkait informasi keuangan (Setyaningrum & Syafitri, 2012). Diperoleh bukti dari hasil penelitian terdahulu terkait dengan ada atau tidaknya implikasi dari ukuran pemda atas pengungkapan informasi keuangan daerah di internet pada situs resmi pemda.

Berdasarkan pada penelitian Medina (2012) ukuran pemda berbanding lurus dengan tingkat ketersediaan serta aksesibilitas informasi keuangan pada situs resmi pemda. Style dan Tennyson (2007) menguji pengaruh ukuran pemerintah lokal di Amerika Serikat atas tingkat ketersediaan dan akses informasi keuangan. Hasil dari pengujian Style dan Tennyson (2007) ukuran berpengaruh positif pada tingkat ketersediaan dan akses informasi keuangan pemerintah lokal di internet. Namun, Adiputra *et al.* (2018) justru memberikan bukti empiris bahwa ukuran pemda tidak memiliki pengaruh signifikan atas transparansi pemda. Ketersediaan laporan keuangan di internet menunjukkan bahwa informasi tersebut dapat diakses dengan mudah secara *online*.

Berdasar penjabaran tersebut, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H1a: Ukuran pemda berpengaruh positif terhadap aksesibilitas IKD pada situs resmi pemda.

H1b: Ukuran pemda berpengaruh positif terhadap ketersediaan IKD pada situs resmi pemda.

Pengaruh Kualitas LKPD Terhadap Aksesibilitas dan Ketersediaan IKD Pada Situs Resmi Pemda

Kualitas laporan keuangan menunjukkan kewajaran dalam penyajian laporan keuangan. Kualitas LKPD dapat diukur dengan opini Badan Pemeriksa Keuangan setelah melakukan audit atas laporan keuangan pemerintah daerah. UU No.15 2004 menjelaskan bahwa terdapat empat jenis opini BPK RI atas pemeriksaan laporan keuangan, yakni WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), WDP (Wajar Dengan Pengecualian), TW (Tidak Wajar), serta tidak menyatakan pendapat. Opini WTP merupakan salah satu opini audit yang memberikan indikasi bahwa LKPD sesuai dengan SAP, pengungkapan cukup, patuh atas kebijakan berlaku, serta keefektifitasan atas pengendalian internal. Untuk mendapatkan WTP, maka LKPD harus bebas dari salah saji material.

Menurut Style dan Tennyson (2007) serta Pina *et al.*, (2010) pemerintah daerah yang memperoleh penghargaan atas praktik pelaporan keuangan yang baik oleh organisasi eksternal akan memiliki kecenderungan untuk mempublikasi laporan keuangan tersebut pada situs resmi pemda di internet. Uraian sebelumnya diperkuat dengan hasil studi Wahyudin Nor *et.al.*, (2019), Annisa dan Murtini (2018) membuktikan opini BPK sebagai ukuran untuk menilai kualitas atas laporan keuangan yang telah disusun oleh pemda berpengaruh pada publikasi informasi keuangan pada situs resmi pemda di internet. Akan tetapi, kontras dengan Nainggolan dan Purwanti (2016) yang melakukan penelitian jauh sebelumnya memberikan bukti bahwa opini BPK tidak berdampak terhadap publikasi LKPD pemda di internet.

Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H2a: Kualitas LKPD berpengaruh positif terhadap aksesibilitas IKD pada situs resmi pemda.

H2b: Kualitas LKPD berpengaruh positif terhadap ketersediaan IKD pada situs resmi pemda.

Pengaruh Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Aksesibilitas dan Ketersediaan IKD Pada Situs Resmi Pemda

Menurut UU No.32 2004 terkait pemerintahan daerah menyatakan kemampuan pemda untuk secara mandiri melaksanakan pertanggungjawaban serta pembiayaan finansial berdasar prinsip desentralisasi (Republik Indonesia, 2004). Tingkat kemandirian keuangan daerah didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah daerah untuk menutupi biaya operasional daerah dalam rangka pemanfaatan sumber pendapatan daerah sendiri untuk mencapai pembangunan daerah serta pelayanan publik. Pendapatan asli daerah memiliki asosiasi positif signifikan terhadap pengungkapan yang lebih atas informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah, kinerja pemerintah yang baik ditunjukkan juga melalui besarnya kemampuan pemda dalam membiayai kegiatan daerah secara mandiri (Laswad *et al.*, 2005). Selain itu, riset Medina (2012) memberikan hasil terkait tingkat kemandirian keuangan daerah yang memiliki hubungan positif dengan ketersediaan IKD pada *website* pemda.

Meningkatnya pengungkapan informasi pemerintah daerah dipengaruhi oleh meningkatnya tingkat kemandirian keuangan daerah ditandai dengan meningkatnya PAD, kepala daerah mampu menciptakan pengelolaan keuangan daerah berkualitas baik. Bertambah tingginya PAD dibandingkan total pendapatan maka semakin tinggi tingkat kemandirian pemda. Akan tetapi, jika kualitas kinerja pemda kurang baik, maka tingkat kemandirian pemda menjadi rendah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H3a: Tingkat kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap aksesibilitas IKD pada situs resmi pemda.

H3b: Tingkat kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap ketersediaan IKD pada situs resmi pemda.

Pengaruh Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Terhadap Aksesibilitas dan Ketersediaan IKD Pada Situs Resmi Pemda

Tekanan permintaan informasi akan terjadi pada wilayah atau area yang memiliki tingkat kesejahteraan tinggi, secara umum kerap kali penduduk pada daerah dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi melakukan penekanan terhadap permintaan informasi yang berkaitan dengan keuangan. Hal tersebut membuat tekanan menjadi lebih besar pada pemda agar mengungkapkan kinerja pemerintahan. Salah satu indikator yang secara umum dapat digunakan untuk memperkirakan derajat sejahtera di suatu daerah ialah pendapatan domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku. Style dan Tennyson (2007) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kesejahteraan suatu wilayah berbanding lurus dengan tingginya tingkat pengawasan masyarakat. Di sisi lain, apabila suatu daerah dengan tingkat kesejahteraan tinggi berarti tingkat kesanggupan adaptasi dengan teknologi baru yang diperlukan untuk memperoleh informasi juga tinggi. Meningkatnya proporsi pengguna internet berpeluang meningkatkan potensi publik menggunakan internet sebagai sarana memperoleh informasi keuangan dari pemda (Serrano Cinca *et al.*, 2009).

Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H4a: Tingkat kesejahteraan masyarakat berpengaruh positif terhadap aksesibilitas IKD pada situs resmi pemda.

H4b: Tingkat kesejahteraan masyarakat berpengaruh positif terhadap ketersediaan IKD pada situs resmi pemda.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah aksesibilitas dan ketersediaan informasi keuangan daerah (IKD) oleh pemerintah daerah. Aksesibilitas IKD didefinisikan sebagai derajat kemudahan memperoleh IKD yang dibutuhkan, dimana pengguna informasi mampu mencari dengan mudah data keuangan yang disediakan oleh pemda melalui situs resminya dan diukur dengan menggunakan Indeks Aksesibilitas yang dikembangkan oleh Styles dan Tennyson (2007) dan telah dimodifikasi sesuai dengan kondisi pemerintahan di Indonesia. Ketersediaan IKD didefinisikan sebagai ada tidaknya IKD seperti komponen laporan keuangan pemda pada situs resmi pemda dan diukur dengan menggunakan variabel dummy, bagi pemda yang mempublikasikan data yang berhubungan dengan keuangan daerah minimal salah satu IKD yang dipublikasikan secara *online* maka diberikan angka 1 (satu), sementara itu, jika pemda tidak menyediakan IKD diberi angka 0 (nol).

Variabel independen dalam penelitian ini antara lain ukuran pemda diproksikan dengan natural logaritma dari total aset, kualitas LKPD diproksikan menggunakan variabel *dummy*, dimana apabila pemda mendapatkan opini BPK wajar tanpa pengecualian (WTP) maka diberi skor satu (1 = WTP), sementara itu, jika pemda mendapat opini BPK selain WTP diberi skor nol (0 = non-WTP), kemudian tingkat kemandirian keuangan daerah dihitung dengan membagi total PAD dengan total pendapatan, dan tingkat kesejahteraan masyarakat diukur dengan natural logaritma pendapatan domestik regional bruto (PDRB).

Tabel 1
Indeks Aksesibilitas

Skor	Syarat
+1	Situs resmi pemda muncul di halaman pertama hasil pencarian menggunakan <i>search engine</i> Google ketika memasukkan nama kabupaten/kota.
+1	Hanya memerlukan ≤ 3 kali klik untuk memperoleh data IKD dalam situs resmi pemda.
+1	Situs resmi pemda menyediakan LKPD tahun sebelumnya, minimal dua tahun agar dapat dibandingkan.
+1	IKD dapat diunduh dalam berbagai format seperti PDF dan HTML.
+1	Situs resmi pemda menyediakan informasi untuk mencetak dokumen IKD.
+1	Situs resmi pemda terdapat minimal satu laporan keuangan berdasar SAP (LRA, Laporan SAL, Neraca, LO, LPE, LAK, CALK) atau APBD (skor maksimum +8)
+1	Situs resmi pemda menyediakan secara detail kontak (telepon atau faximile atau e-mail) guna memperoleh IKD jika tidak terdapat di <i>website</i> .
+1	Dalam situs resmi pemda terdapat <i>search engine</i> yang dapat mempercepat pencarian IKD.

Sumber: telah diolah kembali (Adiputra *et al.*, 2018; K, Styles, 2007; Medina, 2012; Ratmono, 2013; Wau, 2015)

Penentuan Sampel

Populasi pada penelitian ini terdiri atas 35 kabupaten/kota yang ada di provinsi Jawa Tengah dengan jumlah tahun pengamatan selama 5 tahun (2015—2019). Sampel penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *sampling* sensus atau sampel jenuh. Menurut Sugiyono (2014) teknik pengambilan sampel dengan menggunakan sensus ialah menjadikan seluruh populasi sebagai sampel.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan untuk menguji aksesibilitas IKD adalah analisis regresi linear berganda dan ketersediaan IKD diuji menggunakan analisis regresi logistik.

Pengujian I

$$\text{AKSES} = \beta_0 + \beta_1\text{UPD} + \beta_2\text{KLK} + \beta_3\text{TKKD} + \beta_4\text{TKM} + e$$

Pengujian II

$$\text{Logit (KETERSEDIAAN)} = \beta_0 + \beta_1\text{UPD} + \beta_2\text{KLK} + \beta_3\text{TKKD} + \beta_4\text{TKM} + e$$

Keterangan:

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$

= Koefisien regresi

UPD

= Ukuran Pemerintah Daerah

KLK

= Kualitas LKPD

TKKD

= Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

TKM

= Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

e

= *error*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Sampel Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh dari pengamatan langsung terhadap situs resmi pemda dari 29 kabupaten dan 6 kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah, laporan hasil pemeriksaan LKPD pada situs resmi BPK perwakilan provinsi Jawa Tengah, dan data BPS diperoleh sampel sebanyak 162 dari 35 kabupaten/kota dengan 5 tahun pengamatan (2015,2016, 2017, 2018, dan 2019).

Tabel 2
Jumlah Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah
Jumlah kabupaten atau kota	35
Jumlah tahun pengamatan 2015–2019	5
Jumlah pengamatan selama 2015–2019 (35x5)	175
Jumlah data outlier ($z\ score \geq 2.5$)	(13)
Jumlah sampel penelitian	162

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021

Seluruh pemerintah kabupaten/kota yang dijadikan sampel penelitian selanjutnya akan diolah berdasarkan proksi yang telah ditentukan. Dibawah ini, Tabel 3 menginformasikan statistik deskriptif dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 3
Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
AKSES	162	,13	1,00	,6638	,28356
TERSEDIA	162	0	1	,81	,395
UPD	162	28,11	30,78	28,8450	,40791
KLK	162	0	1	,85	,362
TKKD	162	,09	,45	,1673	,05376
TKM	162	16,48	18,49	17,2256	,44593

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021

Pembahasan Hasil Penelitian

Tabel 4
Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Pengujian I Aksesibilitas IKD		Keterangan	Pengujian II Ketersediaan IKD		Keterangan
	β	Sig.		β	Sig.	
(Constant)	1,125	0,563		-7,824	0,677	
UPD	0,056	0,340	H1a ditolak	1,016	0,107	H1b ditolak
KLK	0,173	0,006	H2a diterima	3,162	0,047	H2b diterima
TKKD	1,142	0,058	H3a ditolak	5,187	0,344	H3b ditolak
TKM	-0,141	0,050	H4a ditolak	-1,231	0,054	H4b ditolak

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021

Pada pengujian I yaitu aksesibilitas IKD, sebelum melakukan uji hipotesis dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Uji tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa dalam model regresi telah memenuhi asumsi *BLUE* (*Best Linear Unbiased Estimator*). Berdasarkan hasil uji asumsi klasik, dalam penelitian ini model penelitian tidak terdapat masalah pada uji asumsi klasiknya sehingga asumsi *BLUE* terpenuhi. Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari Uji Normalitas Data, Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi (*Run Test*), dan Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser). Alat uji statistic menggunakan SPSS 25.0.

Pengaruh Ukuran Pemda (UPD) Terhadap Aksesibilitas dan Ketersediaan IKD Pada Situs Resmi Pemda

Berdasarkan Tabel 4 hasil pengujian pada hipotesis pertama dari model pengujian I yaitu H1a tidak didukung secara statistik. Variabel UPD memiliki nilai signifikansi lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi ($0,340 > 0,05$). Tidak berpengaruhnya ukuran pemda terhadap aksesibilitas IKD pada situs resmi pemda di internet dalam penelitian ini selaras dengan riset Ratmono (2013), Wau dan Ratmono (2015), Nainggolan dan Purwanti (2016), Adiputra *et al.*, (2018), Annisa dan Murtini (2018). Laporan keuangan merupakan hasil pertanggungjawaban keberjalanan roda pemerintahan terkait sumber daya yang telah diamanatkan rakyat pada pemda, aset yang mencerminkan ukuran pemda pada penelitian ini juga merupakan bagian dari LKPD yaitu neraca yang mana apabila dikorelasikan dengan teori agensi maka pemda berkewajiban untuk melaporkan aset tersebut terkait penggunaan sumber daya kepada masyarakat sebagai pihak yang telah memberikan kepercayaan pada pemda. Akan tetapi, sesuai dengan hasil penelitian, ukuran pemerintah daerah tidak menjadi faktor pendorong kemudahan masyarakat umum dalam mengakses IKD pada situs resmi pemda. Selain itu, menurut penelitian Adiputra *et al.*, (2018) ukuran pemda yang diukur berdasar natural logaritma total aset tidak berpengaruh terhadap aksesibilitas IKD pada situs resmi pemda di internet diduga disebabkan oleh aset pemda yang belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk realisasi transparansi sehingga belum berfokus dalam memberikan kemudahan akses informasi keuangan daerah di situs resmi pemda. Selain itu, hal tersebut juga dimungkinkan karena aset yang dimiliki dialokasikan untuk tujuan lain selain penyediaan informasi dan infrastruktur teknologi komunikasi oleh pemerintah daerah.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil uji regresi logistik dari model pengujian II yaitu H1b. Hal tersebut dibuktikan *p-value* (Sig.) lebih besar dibanding tingkat signifikansi ($0,107 > 0,05$). Hasil penelitian ini konsisten dengan studi Ratmono (2013), Wau dan Ratmono (2015), Nainggolan dan Purwanti (2016), Annisa dan Murtini (2018) yang tidak mendapat bukti pengaruh signifikan antara UPD dengan ketersediaan IKD pada situs resmi pemda. merujuk pada teori keagenan, semakin besar jumlah kekayaan atau aset yang dimiliki maka kontrol publik terhadap kegiatan pemerintahan akan semakin ketat karena khawatir terhadap indikasi penyalahgunaan dana yang dilakukan pemda. Akan tetapi, mengingat kembali pada pembahasan paragraf sebelumnya bahwa ukuran pemda kabupaten atau kotamadya di Jawa Tengah 2015—2019 masih berada pada kategori sedang dengan sedikit rendah maka ukuran pemda tidak berdampak secara langsung terhadap ketersediaan IKD pada situs resmi di internet diduga karena pengawasan masyarakat terhadap kegiatan pemerintah tidak terlalu ketat sehingga ukuran pemda tidak secara langsung dapat mendorong pemda dalam menyediakan IKD di internet.

Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pembahasan pada hasil pengujian statistik dan analisis, UPD tidak memiliki pengaruh terhadap transparansi IKD pada situs resmi pemda yang dilihat dari aksesibilitas serta ketersediaan IKD dalam penelitian ini.

Pengaruh Kualitas LKPD (KLK) Terhadap Aksesibilitas dan Ketersediaan IKD Pada Situs Resmi Pemda

Berdasarkan hasil pengujian pada hipotesis kedua dari model pengujian I yaitu H2a dalam penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh signifikan dengan arah hubungan yang positif antara kualitas LKPD (KLK) dengan aksesibilitas IKD pada situs resmi pemda. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil uji signifikansi parameter individual pada Tabel 4, variabel KLK mempunyai nilai signifikan lebih kecil dibanding tingkat signifikansi ($0,006 < 0,05$). Selaras dengan hasil pengujian model I, hasil uji regresi logistik dari model pengujian II yaitu H2b memperlihatkan kualitas LKPD berpengaruh signifikan terhadap ketersediaan IKD di website resmi pemda. Hal ini dibuktikan dengan pada Tabel 4.27 yang menyatakan bahwa angka *p-value* (Sig.) lebih kecil dibanding tingkat signifikansinya ($0,047 < 0,05$). Hasil pengujian model I dan model II untuk hipotesis H2a serta H2b yang dibangun oleh peneliti mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Styles dan Tennyson (2007), Wau dan Ratmono (2015), Adiputra *et al.*, (2018), serta Nor Wahyudin *et al.*, (2019) yang menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan terhadap aksesibilitas ataupun ketersediaan IKD pada website resmi pemda di internet.

Dari hasil penelitian ini diperoleh bukti bahwa semakin baik kualitas LKPD yang dilihat dari hasil opini audit BPK, maka semakin mendorong pemda untuk memberi kemudahan pada publik untuk mengakses serta menyediakan IKD melalui situs resmi. Kualitas LKPD memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pemda dalam menyajikan laporan keuangannya sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga hal ini mampu meningkatkan rasa percaya dari masyarakat bahwa keuangan daerah dimanfaatkan secara benar untuk kesejahteraan publik. Berdasarkan analisis statistik deskriptif, mayoritas kabupaten/kota di Jawa Tengah mendapat opini WTP yaitu sebesar 84,57%. Seperti yang telah diketahui, WTP merupakan opini terbaik bagi pemda, dimana pemda telah menyusun LKPD sesuai dengan SAP serta memiliki sistem pengendalian internal yang baik pula. Dengan demikian, dalam penelitian ini disimpulkan bahwasanya semakin baik kualitas LKPD berbanding lurus dengan semakin baiknya pengungkapan atau ketersediaan informasi keuangan daerah. Hal ini berkaitan dengan teori institusional, praktik pelaporan keuangan tersebut yang dilakukan oleh pemerintah daerah dianggap sebagai bentuk adopsi praktik sah dan diterima secara sosial dengan maksud untuk memperoleh legitimasi atau pengakuan dari konteks institusional pemda yakni masyarakat.

Hasil studi ini sesuai dengan *signalling theory* dan *agency theory*, laporan keuangan ialah sinyal informasi dari pemda sebagai *signaler* kepada *receiver* yaitu masyarakat. Perolehan opini WTP dari BPK kepada pemda atas kinerja manajemen pemda yang telah dianggap baik merupakan sinyal positif yang harus disampaikan kepada masyarakat sebagai upaya meminimalisir asimetri informasi antara agen dengan prinsipal. Sesuai hasil penelitian ini, pemerintah daerah berupaya untuk menyampaikan sinyal positif melalui kemudahan bagi masyarakat dalam akses serta penyediaan IKD dengan mendayagunakan teknologi internet. Dalam hal ini tidak hanya masyarakat yang dimudahkan tetapi pemda juga akan memperoleh manfaat berupa terciptanya reputasi positif pemerintah dalam pandangan masyarakat karena telah menjalankan amanat dengan upaya yang terbaik.

Dengan berdasar pada hasil uji statistik dan analisis, maka disimpulkan bahwa kualitas LKPD yang baik berpengaruh signifikan dengan arah hubungan positif terhadap transparansi IKD di situs resmi pemda kabupaten/kota di Jawa Tengah selama 2015—2019.

Pengaruh Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD) Terhadap Aksesibilitas dan Ketersediaan IKD Pada Situs Resmi Pemda

Tingkat kemandirian keuangan daerah (TKKD) tidak berpengaruh signifikan terhadap aksesibilitas IKD di situs resmi pemda dikarenakan nilai Sig. 0,058 lebih besar dibanding tingkat signifikansinya 5%. Oleh sebab itu, hipotesis 3a ditolak. Hasil studi sejalan dengan Medina (2012), Nainggolan dan Purwanti (2016), serta Annisa dan Murtini (2018). Hasil uji regresi logistik untuk H3b dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa tingkat kemandirian keuangan tidak berdampak signifikan terhadap ketersediaan IKD pada situs resmi pemda di internet. Hal tersebut dibuktikan oleh hasil pengujian signifikansi parameter individual pada Tabel 4 yang menunjukkan nilai statistik *p-value* (Sig.) lebih besar dibandingkan dengan tingkat signifikansinya ($0,344 > 0,05$).

Dalam penelitian ini, dapat dijumpai tidak jarang pemkab/pemkot dengan perolehan PAD yang kecil dibandingkan keseluruhan pendapatan. Dependensi pemda masih tinggi, sehingga berdasarkan hal tersebut diduga pemerintah daerah cenderung untuk menutup-nutupi informasi keuangan daerahnya karena tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pendapatan lain selain PAD yang dimiliki. Menurut Oktaviani dan Sari (2020) daerah yang independen akan terus mengupayakan peningkatan transparansi dan pertanggungjawaban agar dipercaya publik sebagai pengelola daerah yang mengusahakan pembangunan daerah dengan menjalankan kegiatan bermanfaat serta mampu dirasakan langsung oleh masyarakat (Oktaviani & Sari, 2020). Upaya pemerintah dalam memperoleh pengakuan publik dituangkan dalam bentuk penyampaian informasi keuangan yang akurat sesuai dengan harapan masyarakat dengan memanfaatkan keberadaan *e-government* sehingga menjangkau seluruh pihak dengan cepat dengan biaya yang murah. Penelitian ini sejalan dengan Wau dan Ratmono (2015) yang memberikan bukti empiris bahwa berdasarkan temuan dalam penelitian, PAD tidak menjamin suatu pemerintah daerah akan mendorong untuk lebih transparan serta akuntabel.

Tabel 5
Kategorisasi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Kualifikasi	Interval (%)	Frekuensi	Persentase
Sangat Kurang (SK)	0,00—10,00	5	3,1%
Kurang (K)	10,01—20,00	128	79%
Sedang (S)	20,01—30,00	27	16,7%
Cukup (C)	30,0—40,00	1	0,6%
Baik (B)	40,01—50,00	1	0,6%
Sangat Baik (SB)	> 50,00	0	0%
Total		162	100%

Sumber: Tim Fisipol UGM dan Balitbang Kemendagri (Taufick,2016).

Hasil analisis dalam penelitian ini pada Tabel 5 kategorisasi TKKD 2015—2019 kabupaten/kota 79% menduduki kategori kurang. Hal tersebut menandakan PAD yang dimiliki oleh pemkab atau pemkot di Jawa Tengah memiliki proporsi yang kecil dari total pendapatan, selain itu, pemerintah pusat memiliki peranan yang dominan dari pemerintahan di daerah itu sendiri dalam hal pendanaan. PAD yang kecil mencerminkan kinerja yang buruk, sedangkan pemda dengan kinerja yang buruk cenderung untuk membatasi akses informasi keuangan kepada masyarakat (Nosihana, 2016). Menurut Nuritomo dan Rossieta (2014) dalam Rachmat (2019) pemda yang memperoleh dana pusat yang besar cenderung akan lebih malas untuk menggali potensi wilayah agar PAD dapat

menghasilkan hasil yang maksimum sehingga mampu untuk membiayai kegiatan operasional daerah (Rachmat, 2019). Tingkat independensi keuangan daerah yang rendah pada kabupaten/kota di Jawa Tengah memperlihatkan tingginya tingkat dependensi atas dana eksternal yang bersumber dari pemerintah pusat, peluang daerah memiliki akuntabilitas pelaporan keuangan akan semakin kecil.

Berdasar hasil uji statistik dan analisis disimpulkan tingkat kemandirian keuangan daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap transparansi IKD yang diproksikan melalui aksesibilitas dan ketersediaan IKD pada website resmi pemda di internet.

Pengaruh Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Terhadap Aksesibilitas dan Ketersediaan IKD Pada Situs Resmi Pemda

Berdasarkan hasil uji H4a dalam model pengujian I terkait pengaruh TKM terhadap aksesibilitas IKD pada situs web resmi pemda tidak dapat didukung secara statistik, nilai signifikansi tepat dengan tingkat signifikansinya yakni 0,050 dengan koefisien beta -0,141 sehingga hipotesis keempat (H4a) yang dibangun oleh peneliti dalam penelitian ini ditolak, selaras dengan penelitian Wau dan Ratmono (2015) yang memperoleh bukti empiris bahwa pendapatan per kapita tidak berpengaruh terhadap aksesibilitas IKD. Hasil uji hipotesis model pengujian II memiliki nilai statistik *p-value* (Sig.) yang lebih besar dibanding tingkat signifikansinya ($0,054 > 0,05$) dengan koefisien beta -1,231, H4b yang dibangun peneliti ditolak karena tidak didukung secara statistik, hasil penelitian didukung oleh studi Wahyudin Nor *et al.* (2019). Oleh sebab itu, tinggi dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang diproksikan dengan pendapatan domestik regional bruto (PDRB) tidak mendorong pemda dalam penelitian ini untuk memberikan kemudahan akses serta mempublikasikan IKD dalam situs resmi masing-masing pemda.

Secara mendasar, berdasarkan teori institusional, pemerintah daerah akan melihat suatu tekanan yang dianggap paling dominan sehingga mendorong pemerintah untuk memilih tindakan yang sesuai dengan arah dan jenis tekanan tersebut. Seharusnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan penduduk yang berada wilayah tersebut akan menekan pemerintah untuk meminta informasi keuangan. Lebih lanjut, masyarakat yang lebih sejahtera cenderung peduli terhadap keberjalanan roda pemerintah, maka semestinya kemudahan dalam mengakses dan ketersediaan informasi keuangan daerah akan lebih diperhatikan oleh pemda sebagai respon terhadap tekanan. Hal ini dikarenakan masyarakat yang sejahtera merupakan masyarakat yang produktif, maka masyarakat tersebut akan terdorong untuk memanfaatkan informasi teknologi dengan maksimal. Sangat dimungkinkan jika tingkat kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Jawa Tengah selama 2015—2019 tidak berpengaruh terhadap akses serta ketersediaan IKD pada website pemda karena tingkat kesejahteraan masyarakat masih berada pada kategori sedang sehingga masyarakat tidak terlalu peduli terhadap keterbukaan informasi keuangan pemda, seringkali masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah hanya memperdulikan terhadap kepentingan pribadinya saja sehingga pemantauan dan tekanan masyarakat terhadap pemerintah atas transparansi informasi keuangan daerah melalui internet semakin berkurang.

Berdasar hasil pengujian I dan II untuk H4a dan H4b ditolak, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat (TKM) tidak berpengaruh signifikan terhadap transparansi IKD melalui situs resmi pemda yang diproksikan dengan aksesibilitas serta ketersediaan IKD.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah hanya variabel kualitas LKPD (KLK) yang berpengaruh positif signifikan terhadap aksesibilitas dan ketersediaan IKD pada situs resmi

pemerintah daerah. Variabel independen lain seperti ukuran pemerintah daerah (UPD), tingkat kemandirian keuangan daerah (TKKD), dan tingkat kesejahteraan masyarakat (TKM) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap aksesibilitas dan ketersediaan IKD pada situs resmi pemda selama 2015—2019. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin baik kualitas LKPD yang dicerminkan melalui perolehan opini WTP atas audit LKPD oleh BPK akan mendorong pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah untuk melakukan transparansi informasi keuangan daerah (IKD) pada situs resmi pemerintah daerah.

Keterbatasan

Penelitian ini tentu memiliki keterbatasan diantaranya kemampuan variabel independen yang dipakai pada penelitian ini dalam menjelaskan variabel dependennya masih rendah sehingga variabel dependen penelitian ini masih belum secara komprehensif dapat dijelaskan oleh variabel independennya. Selain itu, data penelitian diperoleh dari situs resmi pemda dan diketahui bahwa masih terdapat situs resmi pemda yang tidak menyediakan LKPD secara lengkap dan tidak melakukan pembaharuan informasi keuangan daerahnya sehingga peneliti harus mencari informasi diluar situs resmi pemerintah daerah seperti mengunjungi situs resmi dari satuan kerja yang berhubungan dengan IKD agar data penelitian dapat terpenuhi dan lengkap. Hasil dari penelitian ini menunjukkan hanya variabel kualitas LKPD saja yang dapat menjelaskan variabel dependen aksesibilitas dan ketersediaan IKD.

Saran

Bagi penelitian selanjutnya :

1. Dapat menggali sumber lain yang bisa digunakan sebagai alternatif untuk membantu melengkapi data penelitian.
2. Disebabkan masih rendahnya kapabilitas variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya, penelitian berikutnya dapat memasukkan variabel independen lain yang dinilai memiliki relevansi dalam menjelaskan aksesibilitas dan ketersediaan IKD di situs resmi pemda seperti tingkat pendidikan masyarakat, *pers visibility*, belanja pemerintah daerah untuk teknologi informasi, dan sebagainya.
3. Penambahan periode penelitian dapat dilakukan serta memilih populasi penelitian yang lebih luas agar data pengamatan lebih variatif.

Bagi pemerintah daerah khususnya pembuat kebijakan tentang pengelolaan keuangan:

1. Perlu sebuah regulasi yang bersifat imperative, pemberian sanksi tegas yang dapat mendorong pemerintah daerah menjadi lebih transparan serta akuntabel mengingat longgarnya regulasi yang mengatur dan membuat pemda merasa “cukup” dengan transparansi IKD saat ini pada situs resminya sehingga pemda kurang termotivasi untuk menyampaikan IKD melalui situs resminya.

REFERENSI

- Adiputra, I. M. P., Utama, S., & Rossieta, H. (2018). Transparency of local government in Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*, 3(1), 123–138.
- Alwahidi, M. R., & Darwanis, D. (2019). Pengukuran Transparansi Keuangan Daerah Berbasis Website Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(1), 153.
- Annisa, R., & Murtini, H. (2018). Accounting Analysis Journal The Determinant of Regional Financial Information Transparency on the Official Website of Local Government. *Accounting Analysis Journal*, 7(1), 43–51.
- Aronmwan, E. J., & Asiriwuwa, O. (2018). Online Financial Disclosures in The Nigerian

- Public Sector. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 5(4), 257–270.
- Carpenter, V. L., & Feroz, E. H. (2001). Institutional Theory and Accounting Rule Choice: An Analysis of Four US State Governments' Decisions to Adopt Generally Accepted Accounting Principles. *Accounting, Organizations and Society*, 26(7–8), 565–596.
- García, A. C., & García-García, J. (2010). Determinants of Online Reporting of Accounting Information by Spanish Local Government Authorities. *Local Government Studies*, 36(5), 679–695.
- Indonesia, R. (2010a). *Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010*. 1–413.
- K, Styles, T. (2007). The accessibility of financial reporting of u.s. municipalities on the internet. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 19(1), 56–92.
- Medina, F. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Pada Situs Resmi Pemerinah Di Indonesia. *Universitas Indonesia*.
- Nainggolan, A. T., & Purwanti, D. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Daerah Via Website. *1*(6), 1–26.
- Nor, W., Hudaya, M., & Novriyandana, R. (2019). Financial statements disclosure on Indonesian local government websites. *Asian Journal of Accounting Research*, 4(1), 112–128.
- Oktaviani, M. A., & Sari, D. P. (2020). Pengaruh kemandirian daerah, kinerja pemerintah daerah, dan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01), 186–193.
- Pina, V., Torres, L., & Royo, S. (2010). Is e-government promoting convergence towards more accountable local governments?. *International Public Management Journal*, 13(4), 350–380.
- Rachmat, D. M. (2019). *Pengaruh Tingkat Kemandirian Daerah, Tingkat Ketergantungan Pusat Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Dengan Kinerja Sebagai Variabel Moderasi*. 2, 1–13.
- Ratmono, D. (2013). Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Internet: Pengujian Teori Institusional dan Keagenan. *Media Ilmiah Akuntansi* (Vol. 51, Issue 4, pp. 28–48).
- Ritonga, I. T., & Syahrir, S. (2016). Mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia: berbasis website. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 20(2), 110–126.
- Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan (Analysis of Effect of Characteristics of Government Regional Against Level Disclosure Reports Financial). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 154–170.
- Wau, I. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketersediaan Dan Keteraksesan Internet Financial Reporting Oleh Pemerintah Daerah. In *Diponegoro Journal of Accounting* (Vol. 4, Issue 4).